

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perekonomian negara dianggap maju jika mikro dan makro dapat tumbuh, selain itu apa bila masyarakatnya memiliki pendapatan, mampu mengelola sumber daya yang ada untuk kegiatan ekonomi, dan pengangguran berada pada angka kecil. Untuk mewujudkan perekonomian yang maju dan berkembang perlu dibangun unsur-unsur yang berkenaan langsung dengan pendapatan, baik itu lapangan kerja, wirausaha, maupun industri.

Bertambahnya kegiatan ekonomi masyarakat yang mendorong peningkatan jumlah produksi barang dan jasa disebut pertumbuhan ekonomi, sehingga berdampak pada naiknya pendapatan nasional.¹ Sektor riil, baik PDB per kapita maupun PDB total, biasanya menunjukkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan PDB. Pada tingkatan daerah terdapat PDRB yang bersifat regional, dengan mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan nilai tambah dari hasil produksi selama periode tertentu.²

Perekonomian didukung oleh kemandirian ekonomi, dimana suatu negara atau wilayah mampu mengolah potensi lokal yang selanjutnya dapat dioptimalkan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berada di setiap daerah dan berperan dalam memulihkan perekonomian setelah krisis moneter dan pandemi, sehingga menjadi alternatif penyedia lapangan kerja serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. UMKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pendapatan.³

UMKM saat ini telah mampu memegang peran yang krusial dalam struktur perekonomian nasional. Di tengah keterbatasan lapangan kerja formal, UMKM hadir sebagai alternatif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan. Hal ini didukung karena Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan oleh

¹Meiriza, M. S., dkk. (2024). Analisis Ekonomi Neo Klasik Terhadap Perkembangan Ekonomi Menurut Robert Solow Dan Trevor Swan. *Ekonomidynamika Jurnal Ekonomi Dinamis*, 6(3), 14.

²Badan Pusat Statistik. (2025). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumedang Menurut Lapangan Usaha 2017-2023*, xiii.

³Aftitah, F. N., dkk. (2024). Pengaruh Umkm Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Pada Tahun 2023. *Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 3(1), 33.

para pelaku UMKM pada bahan baku yang mudah diakses, pasar yang luas, dan jumlah tenaga kerja yang cukup untuk menjadi faktor pendukung.⁴

Saat ini UMKM telah mengambil alih penyumbang pertumbuhan perekonomian nasional, jumlah UMKM di Indonesia pada 2023 menembus 66 juta unit usaha. UMKM berkontribusi mencapai 61% atau setara dengan Rp9,5 triliun terhadap PDB nasional. Sektor UMKM menyerap tenaga kerja hampir 97% dari jumlah angkatan kerja atau sekitar 117 juta.⁵ Pulau Jawa merupakan provinsi dengan jumlah UMKM terbanyak, Jawa Barat menempati posisi ketiga pada 2024 dengan jumlah Usaha Mikro Kecil sebanyak 640.316, setelah Jawa dan Jawa Tengah. Adapun 17 wilayah kabupaten dan atau kota di Jawa Barat dengan jumlah UMKM tertinggi pada 2017-2023 dengan urutan pertama Kabupaten Bogor.

Tabel 1.1
Pertumbuhan Jumlah UMKM Jawa Barat 2017-2023

Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Bogor	398.253	422.894	449.059	476.844	506.347	537.676	570.943
Kabupaten Bandung	375.135	398.346	422.992	449.164	476.954	506.465	537.801
Kota Bandung	365.218	387.815	411.810	437.290	464.346	493.076	523.584
Kabupaten Sukabumi	285.646	303.319	322.086	342.015	363.176	385.646	409.507
Kabupaten Garut	275.175	292.200	310.279	329.477	349.863	371.510	394.496
Kabupaten Cirebon	268.233	284.829	302.452	321.166	341.037	362.138	384.544
Kabupaten Cianjur	266.326	282.804	300.302	318.882	338.612	359.563	381.810
Karawang	248.060	263.408	279.705	297.011	315.388	334.902	355.623
Kabupaten Bekasi	245.337	260.517	276.635	293.752	311.927	331.226	351.720
Kota Bekasi	215.620	228.960	243.127	258.170	274.143	291.105	309.116
Indramayu	202.866	215.418	228.747	242.900	257.929	273.887	290.833
Kabupaten Tasik	199.704	212.060	225.181	239.114	253.908	269.618	286.300
Kabupaten Subang	180.283	191.437	203.282	215.859	229.215	243.397	258.457
Kota Depok	172.435	183.104	194.433	206.463	219.238	232.803	247.207
Majalengka	166.545	176.850	187.792	199.411	211.749	224.850	238.762
Bandung Barat	165.957	176.225	187.128	198.707	211.001	224.056	237.919
Ciamis	148.364	157.543	167.291	177.642	188.633	200.304	212.697

Sumber: Open Data Jabar (2024)

⁴Enjel, S. (2019). *Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkh) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Agen Kelapa Sawit Di Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji*, 20-21.

⁵Kadin Indonesia. (2025). *UMKM Indonesia*. KADIN INDONESIA Indonesian Chamber of Commerce and Industry. <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>

Menurut Open Data Jabar 2023, kabupaten/kota dengan UMKM tertinggi yaitu Kabupaten Bogor dengan jumlah UMKM 570.943, adapun urutan ke-17 yaitu Ciamis dengan jumlah UMKM sebanyak 212,697. Setiap wilayah mengalami kenaikan setiap jumlahnya, hal ini mengindikasikan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di berbagai usaha mikro kecil menengah di Jawa Barat, ditemukan masalah terkait dengan kegiatan perekonomian, khususnya mengenai inflasi. Inflasi yang terjadi di Jawa Barat pada 2017-2021 menurun, namun meningkat secara drastis pada 2022 di angka 6,04% sehingga mengganggu stabilitas perekonomian. Inflasi pada umumnya disebabkan oleh permintaan tinggi maupun meningkatnya peredaran uang.

Tabel 1.2
Tingkat Inflasi Jawa Barat 2017-2023

Tahun	Inflasi (dalam persen)
2017	3,63
2018	3,54
2019	3,21
2020	2,18
2021	1,96
2022	6,04
2023	2,48

Sumber: Badan Pusat Statistik (2026)

Kenaikan inflasi di Jawa Barat pada 2022 disebabkan oleh banyak hal, diantaranya yaitu distribusi dari petani/peternak ke tangan konsumen, namun faktor utama yang menjadi penyebab adalah kenaikan bahan bakar pertalite pada akhir 2022. Kenaikan bahan bakar ini berdampak pada komoditas bahan pangan karena biaya distribusi maupun peralatan yang menggunakan bahan bakar.⁶ Kenaikan tingkat inflasi dapat menyulitkan masyarakat terutama pelaku usaha karena tekanan biaya yang tinggi (*cost push*).

Sehingga langkah yang dilakukan yaitu dengan meminimalisir biaya produksi melalui penurunan tingkat penawaran, karena kenaikan harga akan mempengaruhi

⁶Tim Data Analisis Jabar Digital Service. (2022, October 12). *Harga BBM Meroket, Apakah Inflasi Jawa Barat Ikut Terkerek?* . Open Data Jabar.<https://opendata.jabarprov.go.id/en/article/harga-bbm-meroket-apakah-inflasi-jawa-barat-ikut-terkerek> (di akses 29 april 2026)

tingkat permintaan dari konsumen. Selain itu pegawai yang bekerja di sektor informal dan tradisional menjadi terancam akibat penekanan biaya produksi tersebut.

Padahal, secara teori makro konvensional pada teori *Cost Push Inflation* dan teori *Purchasing Power Theory* bahwa inflasi yang tinggi terutama diatas 5% dapat menekan pertumbuhan UMKM karena kenaikan biaya input, hal ini dikarenakan UMKM sangat sensitif terhadap harga bahan baku. Jika harga naik, margin keuntungan menipis, sehingga jumlah UMKM baru tentunya berkurang karena risiko kegagalan tinggi. Selain itu akibat penurunan daya beli riil, dimana inflasi dapat menggerus nilai uang dan masyarakat akan mengurangi tingkat konsumsi yang berakibat pada turunnya omzet UMKM

Ibnu Khaldun menegaskan dalam *"The Muqaddimah: An Introduction to History"* bahwa *"kemurahan harga yang berlebihan akan mengancam mata pencaharian dan pendapatan para pengusaha yang bergerak dalam komoditi yang murah tersebut. Begitu juga sebaliknya apabila ada kemahalan"*.⁷ Kenaikan harga yang terjadi dapat menjadi resiko besar bagi pelaku usaha kecil terutama yang baru terjun didunia usaha mikro.

Penyimpangan yang terjadi, baik menurut teori ekonomi klasik maupun teori harga oleh Ibnu Khaldun maupun teori inflasi oleh Al-Maqrizi bahwa inflasi sebagai penghambat pertumbuhan. Namun pada kenyataannya di Jawa Barat bahwa UMKM justru menunjukkan resiliensi, yaitu pelaku usaha tetap bertahan dalam kondisi tekanan inflasi yang tinggi.

Permasalahan yang terjadi tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor. Menurut dugaan peneliti, terdapat beberapa faktor yang sangat menentukan dalam Pertumbuhan UMKM di Jawa Barat khususnya 17 Kabupaten/Kota dengan Pertumbuhan UMKM tertinggi, di antaranya adalah:

⁷Khaldun, A.-A. A. bin M. bin. (2011). *Mukaddimah Ibnu Khaldun* (M. N. Ridwan, Ed.; M. Irham, M. Supar, & Zuhri Abidun, Trans.; 1st ed.). Pustaka Al-Kautsar, 721.

1. Faktor Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, karena dalam kenyataannya memperlihatkan kecenderungan-kecenderungan sebagai berikut:

Tabel 1.3
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Jawa Barat 2017-2023

Wilayah	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bogor	64,07	62,71	65,42	62,65	62,55	63,75	64,22
Bandung	62,81	61,89	65,38	62,20	65,12	63,64	67,10
Kota Bandung	63,11	61,98	65,98	64,71	65,31	69,42	66,97
Sukabumi	63,75	62,72	62,68	61,56	64,93	69,11	67,75
Garut	62,92	60,13	62,70	61,11	62,76	68,84	70,10
Cirebon	61,25	61,85	65,38	63,79	64,49	65,53	66,16
Cianjur	58,28	60,32	66,14	69,26	67,98	69,98	72,31
Karawang	64,94	64,77	63,62	64,90	64,19	65,51	63,40
Bekasi	61,26	61,46	64,03	64,23	65,87	65,41	65,00
Kota Bekasi	64,35	65,30	65,70	64,74	64,76	65,33	64,65
Indramayu	63,33	65,04	67,89	69,53	69,86	69,08	63,88
Tasik	63,56	64,23	66,66	69,54	68,18	67,83	68,37
Subang	66,60	64,41	67,88	66,70	67,78	68,87	70,03
Depok	64,04	62,64	65,03	63,96	62,62	63,35	62,76
Majalengka	66,11	65,76	67,97	69,66	67,63	66,21	68,50
Bandung Barat	61,73	61,26	61,97	59,91	60,75	64,37	67,01
Ciamis	70,01	66,67	67,39	71,41	69,83	68,47	66,26

Sumber : Badan Pusat Statistik (2026)

TPAK mengalami fluktuasi di setiap wilayah, hal tersebut karena ketidakpastian lowongan kerja, wilayah yang mengalami penurunan TPAK pada 2023 antara lain, Kota Bandung, Sukabumi, Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Indramayu dan Depok. Namun selalu ada kenaikan persentase yang mencerminkan semakin besarnya rasio penduduk usia kerja yang terlibat aktif dalam perekonomian, baik yang sudah berstatus pekerja maupun pelamar.⁸

Sedangkan pada penelitian terdahulu terdapat inkonsistensi atas temuan Wulandari, dkk (2021) yang mengemukakan bahwa saat pandemi, TPAK tidak memengaruhi pertumbuhan ekonomi, dimana termasuk didalamnya UMKM.⁹ Begitupun temuan milik Soava, dkk (2020) yang mengemukakan tenaga kerja

⁸Pemerintah Kabupaten Bandung. (2025). *Rancangan Akhir RPJMD*, 2.136

⁹Wulandari, dkk. (2021). Pengaruh Partisipasi Angkatan Kerja, Pendapatan Pajak Daerah, dan Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi Era Pandemi Covid-19 dengan Islamic Human Development Index sebagai Variabel Moderasi. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(1), 178–188.

tidak berdampak secara signifikan di negara Uni Eropa, dalam hal ini tenaga kerja termasuk dalam partisipasi angkatan kerja.¹⁰

2. Faktor Konsumsi Rumah Tangga, karena dalam kenyataannya memperlihatkan kecenderungan-kecenderungan sebagai berikut:

Tabel 1.4
Konsumsi Rumah Tangga Jawa Barat 2017-2023 (miliar rupiah)

Wilayah	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bogor	140.026,33	150.290,24	162.520,75	158.114,06	162.606,14	177.581,83	191.942,29
Bandung	82.730,00	90.680,00	98.630,00	99.719,67	102.613,91	112.574,11	123.098,14
Kota Bandung	141.574,75	155.569,48	170.070,25	170.404,81	175.952,72	193.443,20	214.184,06
Sukabumi	36.798,94	40.096,23	43.713,67	43.796,96	45.358,29	49.146,33	53.625,34
Garut	38.625,00	42.329,00	46.132,00	46.572,85	48.134,85	52.281,10	57.323,71
Cirebon	37.380,00	40.680,00	44.170,00	44.190,00	46.550,00	50.700,00	55.180,00
Cianjur	31.607,52	33.280,74	36.111,19	36.226,78	37.476,11	40.390,46	43.776,40
Karawang	75.341,63	82.235,50	89.338,11	88.952,25	92.492,49	102.286,64	110.094,59
Bekasi	108.694,19	117.993,54	126.730,86	126.262,02	132.881,17	146.090,03	160.897,28
Kota Bekasi	95.332,88	103.121,62	110.686,27	109.145,58	112.770,63	121.706,70	130.955,10
Indramayu	29.537,33	31.868,84	34.512,06	34.608,23	35.696,86	39.290,12	41.803,84
Tasik	26.686,62	29.012,41	31.283,73	31.578,07	32.873,79	35.532,31	38.560,71
Subang	26.139,90	28.230,04	30.020,85	29.571,80	30.363,43	33.104,43	35.645,44
Depok	74.880,46	81.801,44	88.139,38	88.960,30	93.264,93	101.774,35	111.084,56
Majalengka	19.461,11	21.316,66	23.163,84	23.135,00	23.918,23	26.304,96	28.547,02
Bandung Barat	26.310,32	28.655,22	31.000,87	31.225,97	32.262,77	35.585,57	38.904,79
Ciamis	18.530,50	20.249,33	21.762,26	22.062,55	22.841,48	25.258,73	27.643,32

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Pertumbuhan PKRT di Kabupaten Bandung terus meningkat setiap tahunnya, meskipun pertumbuhan paling rendah terjadi pada 2020 karena pandemi yang mengakibatkan turunnya daya jual beli akibat pembatasan wilayah. Sedangkan pertumbuhan tertinggi mencapai 4,12% terjadi pada 2023.¹¹

Berdasarkan hasil temuan milik Lestari & Hendrati (2023) yang mengemukakan bahwa PKRT tidak berdampak yang signifikan terhadap

¹⁰Soava, G., Mehedintu, A., Sterpu, M., & Raduteanu, M. (2020). Impact of Employed Labor Force, Investment, and Remittances on Economic Growth in EU Countries. *Sustainability (Switzerland)*, 12(23), 1–31.

¹¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung. (2025). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Menurut Pengeluaran 2017-2023*, 47

pertumbuhan ekonomi yang dimana didalamnya termasuk pada pertumbuhan UMKM, karena hasil uji menunjukkan pengeluaran rumah tangga memiliki dampak paling kecil.¹²

Selaras dengan pemaparan latar belakang tersebut, dipandang perlu untuk melakukan kajian mendalam mengenai **“Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dimoderasi oleh Inflasi di Jawa Barat Tahun 2017-2023”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan UMKM?
2. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan UMKM?
3. Bagaimana Inflasi memoderasi pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan UMKM?
4. Bagaimana pengaruh Konsumsi Rumah Tangga terhadap Pertumbuhan UMKM?
5. Bagaimana Inflasi memoderasi pengaruh Konsumsi Rumah Tangga terhadap Pertumbuhan UMKM?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan UMKM.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan UMKM.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh Inflasi memoderasi pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan UMKM.

¹² Lestari, H. P., & Hendrati, I. M. (2024). The Effect of Household Consumption Expenditure, Government Expenditure and Per Capita Income on Economic Growth in Sidoarjo Regency. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 1306

4. Menguji dan menganalisis pengaruh Konsumsi Rumah Tangga terhadap Pertumbuhan UMKM.
5. Menguji dan menganalisis pengaruh Inflasi memoderasi pengaruh Konsumsi Rumah Tangga terhadap Pertumbuhan UMKM.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diproyeksikan dapat memberikan kontribusi signifikan, baik secara teoretis (akademis) maupun praktis:

1. Secara akademis:

Secara akademis, temuan dalam studi ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan dengan menjadi studi perbandingan terhadap penelitian selanjutnya serta menjadi referensi akademik mengenai peran dan pertumbuhan UMKM baik terhadap PDB secara nasional maupun dalam pembangunan ekonomi lokal.

2. Secara praktis:

Penelitian ini diproyeksikan mampu memberikan kontribusi substantif bagi perkembangan usaha untuk pelaku usaha mikro juga industri mengenai kondisi inflasi yang menjadi hambatan dalam kestabilan biaya produksi dan daya beli masyarakat. Serta mengidentifikasi berbagai determinan yang memengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Barat.

E. Batasan Masalah dan Definisi Operasional

1. Batasan Masalah

Batasan masalah yang jelas diperlukan untuk menghindari perluasan bahasan yang meluas dan menjaga relevansi studi, penelitian ini membatasi ruang lingkup kajiannya pada:

- a. Ruang Lingkup Wilayah, penelitian ini merupakan data wilayah Provinsi Jawa Barat yang dipanelkan dengan mengambil 17 kabupaten/kota dengan jumlah UMKM terbanyak sehingga hasil penelitian hanya merepresentasikan kondisi wilayah tersebut dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi pada daerah lain.
- b. Ruang Lingkup Waktu, studi ini mengamati fenomena melalui data deret waktu yang mencakup rentang tujuh tahun, yaitu pada

interval 2017–2023. Pemilihan periode tersebut disesuaikan dengan ketersediaan dan kelengkapan data sekunder yang dipublikasikan oleh instansi resmi.

- c. Variabel Penelitian, membahas pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (X_1) dan Konsumsi Rumah Tangga (X_2) sebagai variabel bebas terhadap Pertumbuhan UMKM (Y) sebagai variabel terikat dan Inflasi (Z) yang bekerja sebagai variabel perubah arah (moderasi). Variabel lain yang berpotensi memengaruhi pertumbuhan UMKM, tidak dianalisis dalam penelitian ini.
- d. Jenis dan Sumber Data, penelitian ini mengandalkan perolehan data sekunder yang dihimpun melalui basis data Badan Pusat Statistik (BPS) dan dataset resmi Pemerintah Jawa Barat (Open Data Jabar).
- e. Metodologi yang digunakan berupa pendekatan kuantitatif dengan metode analisis statistik deskriptif, dan teknik analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA).
- f. Pengukuran Pertumbuhan UMKM, penelitian ini diukur hanya berdasarkan jumlah unit UMKM per tahun dan tidak mencakup aspek lain seperti omzet, laba, produktivitas, maupun keberlanjutan usaha.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional memberikan spesifikasi teknis mengenai variabel yang dilibatkan dalam studi. Merujuk pada pandangan Sugiyono (2008), hal ini mencakup segala entitas yang ditetapkan oleh peneliti sebagai subjek kajian untuk dieksplorasi lebih lanjut hingga menghasilkan simpulan yang valid.¹³

Studi ini menguji pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (X_1) dan Konsumsi Rumah Tangga (X_2) terhadap Pertumbuhan UMKM (Y) yang dimoderasi inflasi (Z), sebagai berikut:

¹³Sugiyono. (2019). *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta, 221.

Tabel 1.5
Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Operasional	Dimensi	Indikator	Skala
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (X1)	Rasio penduduk usia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi dibandingkan dengan total penduduk usia kerja di suatu wilayah tertentu. ¹⁴	Penduduk Usia Kerja	Jumlah penduduk usia kerja (>18 tahun). ¹⁵	Rasio (%)
			Angkatan Kerja	Penduduk bekerja atau absen bekerja sementara waktu dan tidak bekerja. ¹⁶	Jiwa
			<i>Employment to Population Ratio</i>	(Penduduk Bekerja / Penduduk usia kerja) x 100%. ¹⁷	Rasio (%)
2	Konsumsi Rumah Tangga (X2)	Total nilai belanja domestik rumah tangga yang mengintegrasikan pengeluaran untuk sektor makanan dan non-makanan. ¹⁸	Tingkat PK-RT	PK-RT per kapita/tahun. ¹⁹	Rasio (Rp)
			Kontribusi terhadap PDRB	(KRT/PDRB total) x 100%. ²⁰	Rasio (%)
			Pertumbuhan KRT	Peningkatan konsumsi rumah tangga. ²¹	Rasio (%)
3	Pertumbuhan UMKM (Y)	Perubahan jumlah UMKM terdaftar per tahun. ²²	Pertumbuhan Jumlah UMKM	Jumlah UMKM yang terdata per tahun. ²³	Rasio Unit
			Pertumbuhan Persentase UMKM	Persentase kenaikan unit UMKM. ²⁴	Rasio (%)
4	Inflasi (Z)	Kondisi yang menunjukkan kenaikan harga yang berlangsung terus-menerus. ²⁵	Indeks Harga Konsumen	Perubahan IHK per tahun. ²⁶	Rasio (%)
			Konsumsi Per Kapita	Total pengeluaran konsumsi barang jasa melalui ADHK. ²⁷	Rasio (%)

¹⁴Todi, D. S., Anggraeni, E., & Susanto, I. (2025). Pengaruh TPAK, Pendidikan, dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Termiskin Se-Indonesia. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 136

¹⁵Badan Pusat Statistik. (2025). *Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Barat Agustus 2024*

¹⁶Badan Pusat Statistik. (2025). *Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Barat Agustus 2024*

¹⁷Badan Pusat Statistik. (2026). *Booklet Sakernas Agustus 2026*.

¹⁸Badan Pusat Statistik. (2025). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat Menurut Pengeluaran 2020-2024*.

¹⁹Badan Pusat Statistik. (2025). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat Menurut Pengeluaran 2020-2024*.46

²⁰Badan Pusat Statistik. (2025). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat Menurut Pengeluaran 2020-2024*.,17

²¹Badan Pusat Statistik. (2025). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat Menurut Pengeluaran 2020-2024*,37

²²Khaldun, A.-A. A. bin M. bin. (2011). *Mukaddimah Ibnu Khaldun* (M. N. Ridwan, Ed.; M. Irham, M. Supar, & Zuhri Abidun, Trans.; 1st ed.). Pustaka Al-Kautsar,654

²³Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2024). *Proyeksi Jumlah UMKM Kabupaten/Kota 2017-2023*. Open Data Jabar. <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/proyeksi-jumlah-usaha-mikro-kecil-menengah-umkm-berdasarkan-kategori-usaha-di-jawa-barat>

²⁴Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2024). *Proyeksi Jumlah UMKM Kabupaten/Kota 2017-2023*. Open Data Jabar. <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/proyeksi-jumlah-usaha-mikro-kecil-menengah-umkm-berdasarkan-kategori-usaha-di-jawa-barat>.

²⁵Awaluddin. (2017). Inflasi dalam Perspektif Islam (Analisis terhadap Pemikiran Al-Maqrizi). *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 16(2), 197

²⁶Badan Pusat Statistik. (2023). *Perkembangan Tingkat Inflasi di Provinsi Jawa Barat 2023*.

²⁷Badan Pusat Statistik. (2025). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat Menurut Pengeluaran 2020-2024*.

F. Kerangka Pemikiran

Sebagai landasan analitis dalam mengelaborasi masalah, penelitian ini mengadopsi sejumlah teori yang berkorelasi erat dengan dimensi tiap variabel, yaitu:

1. Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan UMKM

a. Teori tentang Pertumbuhan UMKM

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan nilai produksi total yang mencakup seluruh sektor kegiatan ekonomi pada cakupan geografis tertentu selama setahun, dan memberikan dampak pada PDRB.²⁸ UMKM merupakan tempat yang tepat untuk penciptaan lapangan kerja yang direncanakan dan disiapkan oleh pemerintah, sektor swasta, dan pelaku usaha individu.²⁹

Islam menganggap pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu instrumen untuk merealisasikan keadilan distributif melalui stimulasi perluasan lapangan kerja,³⁰ seperti pendapat Ibnu Khaldun bahwa

فكثرة العُمران تُوجبُ كثرة الصنائع، وكثرة الصنائع تُوجبُ كثرة الكسب.

Bahwa "*Banyaknya pemukiman (populasi) menyebabkan banyaknya industri (kerajinan/profesi), dan banyaknya industri menyebabkan banyaknya penghasilan (kekayaan)*",³¹ salah satunya yaitu industri lokal rumahan.

b. Teori tentang Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

TPAK merupakan persentase dari Individu dalam rentang usia produktif (18 tahun ke atas) yang tergolong sebagai angkatan kerja, mencakup penduduk yang telah terserap pasar kerja maupun yang

²⁸Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung. (2025). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Menurut Lapangan Usaha 2017-2023*, 92.

²⁹Syukron Madfuz, L., Tahir, M., & Halim, A. (2025). The Influence of The Growth of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) on Labor Absorption in Central Mamuju District, Indonesia. *Golden Ratio of Social Science and Education*, 5(1), 202–210.

³⁰Naqvi, S. N. H. (2003). *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam* (M. S. Anam & M. U. Mubin, Trans.; 1st ed.). Pustaka Pelajar, 136.

³¹Khaldun, A.-A. A. bin M. bin. (2011). *Mukaddimah Ibnu Khaldun* (M. N. Ridwan, Ed.; M. Irham, M. Supar, & Zuhri Abidun, Trans.; 1st ed.). Pustaka Al-Kautsar, 654.

sedang berupaya mencari lapangan pekerjaan, cara menghitung untuk mengetahui TPAK melalui perbandingan proporsi angkatan kerja di dalam struktur penduduk usia kerja.³² Peningkatan TPAK berkorelasi linear dengan ketersediaan kapasitas kerja dalam proses manufaktur barang serta penyediaan jasa.³³ Tenaga Kerja dalam Islam dipandang sebagai tokoh utama dalam penciptaan nilai pada suatu barang.³⁴ Sehingga memiliki keutamaan dalam kegiatan perekonomian yang diatur secara langsung dalam Al-Qur'an, sehingga perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dapat menjadi bagian dari Pertumbuhan UMKM karena dengan meningkatnya jumlah usaha mikro maka semakin banyak tenaga kerja yang terserap, sehingga partisipasi angkatan yang bekerja semakin meningkat.³⁵ Sesuai dengan pendapat Ibnu Khaldun bahwa manusia diberikan kemampuan untuk menciptakan suatu produk, dan jika tidak dapat menghasilkan barang dari kerajinan, maka termasuk dengan bekerja seperti pertukangan dan pertenunan yang dapat memberikan nilai pendapatan.³⁶ Maka meningkatnya intensitas partisipasi masyarakat dalam ranah kegiatan ekonomi produktif berdampak pada pendapatan dan pertumbuhan ekonomi yang sudah tentu berdampak pada jumlah pertumbuhan usaha.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yanto (2022) dalam meneliti aspek yang berimplikasi pada UMK di Kota Parepare, bahwa variabel tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap pendapatan UKM secara parsial selain itu.³⁷ Begitupun dengan temuan

³²Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung. (2025). *Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung 2024*, 17

³³Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung. *Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung 2024*, 2.136

³⁴Hijriah, H. Y., & Elfira, M. A. (2019). Pasar Tenaga Kerja: Sebuah Tinjauan Dalam Perspektif Islam. *TIJAB: The International Journal Of Applied Bussiness*, 3(1), 25

³⁵Maipita, I. (2019). The Effect of Consumption and The Labour Force Participation Rate (LFPR) on Economic Growth in North Sumatera Province. *QE Journal* | Vol, 9(2), 19

³⁶Khaldun, A.-A. A. bin M. bin. (2011). *Mukaddimah Ibnu Khaldun* (M. N. Ridwan, Ed.; M. Irham, M. Supar, & Zuhri Abidun, Trans.; 1st ed.). Pustaka Al-Kautsar, 686

³⁷Yanto, M. A. (2022). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Usaha Mikro Kecil di Kota Parepare*. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Usaha Mikro Kecil Di Kota Parepare

oleh Mahfudz, dkk (2025) yang mengemukakan pertumbuhan UMKM memengaruhi penyerapan tenaga kerja. Hasil tersebut mengindikasikan adanya keterkaitan erat antara perkembangan UMKM dan dinamika tenaga kerja.³⁸ Selaras dengan temuan milik Ramdhan, dkk (2021) yaitu jumlah usaha mikro kecil memiliki pengaruh kuat pada penyerapan tenaga kerja.³⁹ Dapat diperoleh kesimpulan peningkatan partisipasi angkatan kerja diduga dapat mendorong pertumbuhan UMKM.

2. Pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan UMKM

a. Teori Pertumbuhan UMKM

Pertumbuhan ekonomi terwujud jika kapasitas produksi suatu ekonomi dapat meningkat dan mengindikasikan bahwa pendapatan nasional dapat meningkat.⁴⁰ Kenaikan produksi dan pendapatan dipengaruhi oleh tingkat harga yang berlaku. Dengan kenaikan pendapatan nasional, maka tingkat konsumtif atau daya beli masyarakat ikut meningkat. Begitupun sebaliknya jika harga barang/jasa pada komoditas tertentu terdapat kenaikan, maka jumlah permintaan dan penawaran menjadi menurun, dan beresiko bagi pertumbuhan ekonomi terutama sektor informal seperti UMKM.

b. Teori tentang Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan yang menyeluruh atas pengeluaran uang terhadap kenaikan tingkat harga suatu komoditas.⁴¹ Kenaikan harga tersebut memberikan dampak kepada pengusaha karena peningkatan biaya produksi yang mendorong pelaku usaha untuk membuat strategi dalam bertahan dan tetap memberikan pelayanan

³⁸Syukron Madfuz, L., Tahir, M., & Halim, A. (2025). The Influence of The Growth of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) on Labor Absorption in Central Mamuju District, Indonesia. *Golden Ratio of Social Science and Education*, 5(1), 202–210

³⁹Ramadhan, M. F., & Juanda, R. (2021). Efektifitas Pengaruh Jumlah UMK dan Inflasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 4(2), 17–23

⁴⁰Marlida, S., & Prasetyo, A. (2023). The Impact Of Labour, Wage, And Human Development Index On Economic Growth. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Airlangga*, 33(2), 188.

⁴¹Awaluddin. (2017). Inflasi dalam Perspektif Islam (Analisis terhadap Pemikiran Al-Maqrizi). *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 16(2), 198

yang baik kepada konsumen, baik penurunan kuantitas yang diberikan, maupun memberikan sedikit kenaikan harga. Dalam pandangan Islam, harga ditentukan oleh pasar, namun pemerintah berperan untuk menjaga stabilitas harga sehingga tidak menyulitkan masyarakat. Al-Maqrizi mengemukakan dua kemungkinan penyebab inflasi, alamiah yaitu karena kelangkaan bahan produksi, dan kedua yaitu ulah manusia karena peredaran mata uang untuk meningkatkan kegiatan perekonomian.

Menurut temuan yang dilakukan oleh Dian Romadhoni,dkk (2020) inflasi memengaruhi Pertumbuhan jumlah UMKM di Jambi, hal ini dikarenakan ketika inflasi melonjak tinggi maka daya beli masyarakat menurun, begitupun sebaliknya ketika tingkat inflasi menurun, daya beli masyarakat meningkat. Dan laju konsumtif masyarakat mempengaruhi keberlanjutan usaha termasuk UMKM.⁴²

3. Inflasi memoderasi pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Pengaruh Pertumbuhan UMKM

Teori kuantitas terdapat dua sumber inflasi yaitu *Demand Pull Inflation* dan *Cost Pull Inflation* (Sukirno, 2004). Pada dasarnya TPAK tinggi memberikan *supply* (pasokan) tenaga kerja yang melimpah untuk UMKM. Namun, saat inflasi tinggi, penambahan tenaga kerja ini justru menjadi beban biaya (*Cost Push*).⁴³

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arini, dkk (2023) bahwa inflasi memberikan dampak jangka panjang dan pendek terhadap tenaga kerja wanita, karena kondisi lonjakan harga berdampak kuat dalam perekonomian bagi wanita.

⁴²Romadhoni, D., Amril, & Emilia. (2020). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi dan suku bunga terhadap pertumbuhan UMKM di Provinsi Jambi. *Journal Perdagangan Industri Dan Moneter*, 8(3)

⁴³ Utami, M. W. (2018). *Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Kemiskinan di Kalimantan Tengah*, 15

4. Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga terhadap Pertumbuhan UMKM

a. Teori Pertumbuhan UMKM

Imam Hasan al-Banna berpendapat bahwa menempatkan industri rumahan sebagai fokus utama dalam pembahasannya tentang reformasi ekonomi berdasarkan ajaran Islam. Umer Chapra menekankan bahwa efektivitas kontribusi swasta terhadap agenda pembangunan dan pemerataan nasional di negara berkembang dapat dicapai melalui pendekatan yang komprehensif.

b. Teori Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi Rumah Tangga (KRT) yaitu produk dan layanan jasa yang digunakan secara berkala oleh penduduk. Pertumbuhan kepadatan penduduk berimplikasi pada melonjaknya permintaan pasar terhadap hasil produksi UMKM.⁴⁴ Konsumsi dalam perspektif Islam merupakan suatu sarana penolong untuk beribadah karena dengan mengonsumsi makanan, manusia memiliki stamina untuk menjalankan ibadah, konsumsi menjadi salah satu upaya dalam mencapai *maslahah* (kebaikan) karena sifatnya memiliki *falah* (manfaat).⁴⁵ Dalam sudut pandang Islam, konsumsi bukan sekadar pemenuhan kesejahteraan material, namun juga spiritual.⁴⁶

Konsumsi yang dikeluarkan oleh Rumah Tangga (PKRT) merupakan pengeluaran terbesar dan paling berdampak pada pertumbuhan ekonomi termasuk UMKM karena dengan semakin tingginya tingkat konsumsi masyarakat, maka pertumbuhan usaha ikut meningkat.

Menurut temuan yang dilakukan oleh Musyaffa & Sishadiyati (2025) dalam penelitiannya bahwa KRT berpengaruh terhadap

⁴⁴Tambunan, T. T. H. (2021). *UMKM di Indonesia: Perkembangan, Kendala, dan Tantangan* (1st ed.). Prenada Media, 36.

⁴⁵Supatminingsih, T. (2018). *Pola Dan Perilaku Konsumsi Rumah Tangga Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kota Makassar*. 16(2), 308

⁴⁶Naqvi, S. N. H. (2003). *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam* (M. S. Anam & M. U. Mubin, Trans.; 1st ed.). Pustaka Pelajar, 134.

pertumbuhan ekonomi. Karena UMKM merupakan bagian dari struktur perekonomian dan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat, maka peningkatan konsumsi Rumah tangga diduga juga mendorong Pertumbuhan UMKM.⁴⁷

5. Inflasi memoderasi pengaruh Konsumsi Rumah Tangga terhadap Pertumbuhan UMKM

Inflasi merupakan kondisi terjadinya kenaikan harga secara masif dan simultan pada berbagai komoditas serta jasa dalam kurun waktu tertentu.⁴⁸ Kenaikan harga ini dapat dipicu oleh beberapa kemungkinan, antara lain jumlah pasokan terbatas akibat kelangkaan barang, naiknya kurs mata uang asing dan tingginya tingkat permintaan (*demand pull*). Pola konsumsi masyarakat menentukan pertumbuhan UMKM, dan inflasi menentukan minat beli masyarakat. Ketika tingkat inflasi naik maka konsumtif menjadi turun, tentunya pertumbuhan UMKM ikut menurun baik pendapatan maupun segi jumlah karena beresiko gerai gulung tikar, begitupun sebaliknya jika inflasi menurun maka pertumbuhan UMKM akan naik karena peningkatan daya beli masyarakat.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eri Febriani (2025) Inflasi secara signifikan memengaruhi elastisitas permintaan dan kemampuan finansial publik, yang memicu kompleksitas dalam menjaga stabilitas pasar. Fenomena ini teramati di Kota Bandung melalui pergeseran perilaku konsumsi menjadi lebih selektif dan berorientasi pada efisiensi biaya.⁴⁹

⁴⁷ Musyaffa, M. F., & Sishadiyati, S. (2025). Determinants of Minimum Wage, Household Consumption Expenditure, and Open Unemployment Rate on Economic Growth in Bekasi City. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 4(7), 3435

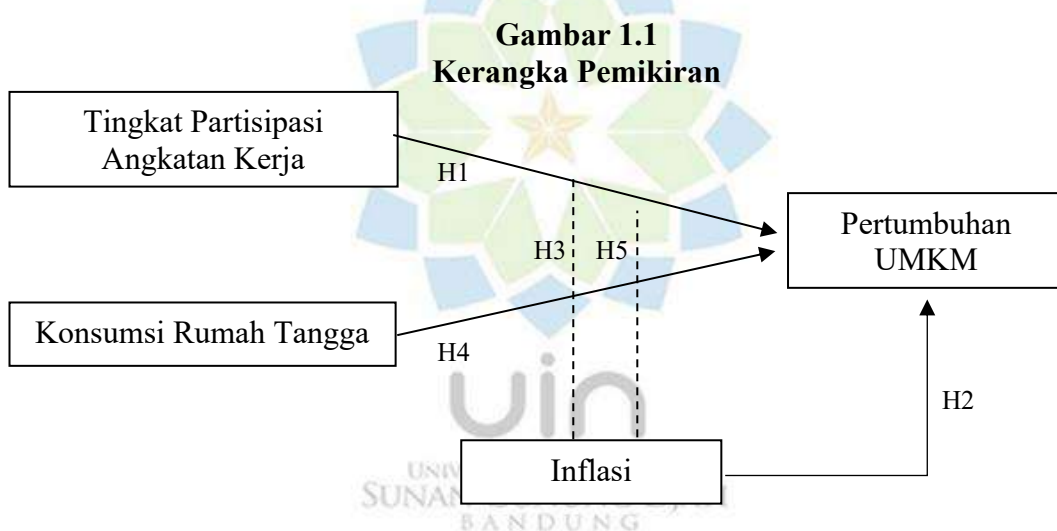
⁴⁸ Awaluddin. (2017). Inflasi dalam Perspektif Islam (Analisis terhadap Pemikiran Al-Maqrizi). *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 16(2), 198

⁴⁹ Febriani, E. (2025). Pengaruh Inflasi terhadap Elastisitas Permintaan dan Daya Beli Masyarakat (Studi Kasus: UMKM Kota Bandung). *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 1–6.

Hubungan antar variable penelitian:

UMKM menyerap cukup besar dalam jumlah partisipasi angkatan kerja (TPAK), sebab secara langsung mengurangi tingkat pengangguran, baik usaha rumahan maupun naik kelas, sehingga angkatan kerja terlibat dalam pertumbuhan jumlah UMKM. Begitupun Konsumsi Rumah Tangga (KRT) yang secara berkala mengonsumsi produk domestik baik makanan maupun non makanan dari UMKM. Sedangkan inflasi sebagai variabel moderasi dapat menguatkan atau melemahkan tingkat partisipasi angkatan kerja dan konsumsi rumah tangga terhadap Pertumbuhan UMKM.

Merujuk pada penjelasan di atas, keterkaitan sistematis antarvariabel tersebut dituangkan ke dalam skema kerangka pemikiran berikut ini:



Bagan tersebut memvisualisasikan kerangka pemikiran di mana Inflasi memoderasi pengaruh TPAK serta KRT terhadap perkembangan jumlah sektor UMKM.

G. Hipotesis

Merujuk pada alur logika dalam kerangka pemikiran tersebut, hipotesis penelitian ini diformulasikan sebagai berikut:

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh terhadap Pertumbuhan UMKM
2. Inflasi berpengaruh terhadap Pertumbuhan UMKM

3. Inflasi memoderasi pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan UMKM
4. Konsumsi Rumah Tangga berpengaruh terhadap Pertumbuhan UMKM
5. Inflasi memoderasi pengaruh Konsumen Rumah Tangga terhadap Pertumbuhan UMKM.

